

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP PERAN DINAS
TENAGA KERJA KOTA BANDAR LAMPUNG
BERDASARKAN PASAL 8 UNDANG-UNDANG
NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum S1
dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh :

**YUNI MERRYLIANI
NPM. 1621020308**

Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443H / 2021M**

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP PERAN DINAS
TENAGA KERJA KOTA BANDAR LAMPUNG
BERDASARKAN PASAL 8 UNDANG-UNDANG
NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum S1
dalam Ilmu Syariah**

Oleh :

**YUNI MERRYLIANI
NPM. 1621020308**

Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing I : Dr. H. Yusuf Baihaqi Lc., M.A.

Pembimbing II : Arif Fikri, S.H.I., M.Ag.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1443H/ 2021M**

ABSTRAK

Indonesia sedemikian luasnya dan didiami berbagai suku bangsa yang beraneka ragam, maka corak pemerintahan sentralis bukanlah tipe ideal sistem pemerintahan yang cocok untuk mengatur wilayah dan penduduk yang demikian banyak dan beragam. Untuk itu diaturlah corak pemerintahan di Indonesia berdasarkan sistem pembagian kekuasaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berdasarkan corak desentralisasi. Diskusi tentang efektivitas pelayanan publik dalam otonomi daerah menjadi semakin menarik untuk dibicarakan, sebagaimana dengan adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Peran dinas tenaga kerja dalam bidang ketenagakerjaan perlu diketahui bagaimana peran dinas tenaga kerja kota Bandar Lampung di bidang ketenagakerjaan yang telah terlaksana berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Peran Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan? 2) Bagaimana analisis *Fiqh Siyasah* terhadap Peran Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan? Penelitian ini bertujuan 1) Untuk mengetahui bagaimana Peran Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 2) Untuk mengetahui analisis *Fiqh Siyasah* terhadap Peran Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial tentunya bersifat apa adanya, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data bersifat deskriptif analisis dengan tahap pengumpulan data, reduksi data, sajian data dan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: Dinas Tenaga Kerja dalam pelayanan bidang ketenagakerjaan di Kota Bandar Lampung, diantaranya Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja, Penempatan Tenaga Kerja, Informasi Kesempatan Kerja, Hubungan Industrial dan Pelayanan Kartu Kuning. Terdapat strategi yang dilakukan pemerintah daerah dalam pelayanan bidang ketenagakerjaan di Kota Bandar Lampung, yaitu dengan melibatkan masyarakat, dimana dengan mengajak masyarakat berpartisipasi dan untuk mengikuti kegiatan pelatihan. Kendala yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung dalam pelayanan Ketenagakerjaan terbagi 2 (dua) yaitu segala bentuk penghambat dan tidak tepat sasaran yang disebabkan oleh kemampuan SDM yang terbatas dan minimnya keterlibatan masyarakat. Dalam pandangan *Fiqh Siyasah* upaya yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja sudah sesuai dengan syariat Islam dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat sekaligus menjadikan lebih tertib sehingga tidak menimbulkan kemudharatan dari perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Manusia sebagai *khalifah* di bumi ialah untuk dapat memakmurkan bumi sesuai dengan syariat Islam. *Khalifah* dalam pandangan Islam selain bertanggung jawab pada dirinya sendiri dia juga harus memikul tanggung jawab sesama makhluk hidup lain nya dan seluruh alam.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini.

Nama : Yuni Merryliani
NPM : 1621020308
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk Skripsi dengan judul: *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Mengimplementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Studi pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandar Lampung)*, adalah benar-benar karya asli saya. Kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan orisinalitas ini saya buat dengan sebenarnya, supaya dapat dipergunakan seperlunya.

Bandar Lampung, 05 Februari 2021

Yang Menyatakan,



YUNI MERRYLIANI
NPM. 1621020308



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Tim pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan masukan secukupnya, maka skripsi saudara.

**Nama : Yuni Merryliani
NPM : 1621020308
Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Peran Dinas
Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung
Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan".**

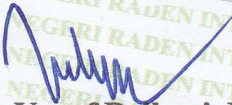
MENYETUJUI

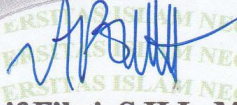
**Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang
Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.**

Bandar Lampung, 15 Agustus 2021

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A.
NIP. 197403072000121000


Arif Fikri, S.H.I., M.Ag.
NIP. -

Ketua Jurusan Siyasah


Frenki, M.Si.
NIP. 198003152009011017



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Letkol H.Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, 35131

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, disusun oleh Nama: **YUNI MERRYLIANI**, NPM: **1621020308**, Program Studi: **HUKUM TATANEGARA (Siyasah Syar'iyah)**, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah pada Hari/Tanggal: **Jum'at, 13 Agustus 2021**.

TIM DEWAN PENGUJI :

Ketua : **Dr. Susiadi AS, M. Sos. I.**

Sekretaris : **Muhammad Irfan, S.H.I., M.Sy.**

Penguji I : **Dr. Muhammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H.**

Penguji II : **Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A.**

Penguji III : **Arif Fikri, S.H.I., M.Ag.**

Dekan

Dr. H. Khairuddin, M.H.

NIP. 196210221993031002



MOTTO

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

“Dan katakanlah, "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kalian akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberikan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”(Qs. At-taubah [9]:105)



PERSEMBAHAN

Penulis haturkan rasa syukur kehadiran Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa cahaya kebenaran, dengan ini kupersembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang sangat berarti dalam perjalanan hidupku. Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan, skripsi ini kupersembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada:

1. Papa tersayang, beliau pahlawan sekaligus guru terbaik dalam hidupku,
2. Mama tersayang, beliau seseorang yang tulus menyayangi sejak diri didalam kandungan hingga dewasa kini, memberikan sebuah motivasi sekaligus teman curhat dalam keluh kesahku, beliau lah yang selalu mendoakanku disetiap keputusan yang aku pilih.
3. Kakak-kakak yang kucintai, terima kasih atas dukungan dan suport nya selama ini, yang selalu menghibur kakak saat jenuh mengerjakan karya tulis.
4. Teman-teman seperjuangku di Angkatan 16 khususnya Jurusan Hukum Tata Negara terima kasih atas kegilaan yang sering kita jalani selama kita kuliah.
5. Para dosen dan staff di kampus yang telah mendidik dan memberikan bimbingan dalam perkuliahan dan skripsi.
6. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Yuni Merryliani lahir di Teluk Betung, pada tanggal 21 Juni 1997. Anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan bapak Parminto Andy dan ibu Turyati. Penulis mengawali pendidikan di SDN03 Titiwangi 2004-2010, Kemudian dilanjutkan pada SMPN 01 Sidomulyo 2010-2013, dilanjutkan sekolah SMAN01 Sidomulyo 2013-2016. Pada tahun 2016 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Program Strata I (satu) Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*).

Bandar Lampung, 05 Februari 2021

YUNI MERRYLIANI
NPM. 1621020308



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya-Nya berupa iman, ilmu pengetahuan dan amal serta kesehatan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *"Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan"*. Sholawat serta salam penulis curahkan kepada baginda nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan dalam menjalankan ibadah kepada Allah SWT, yang kita harapkan beliau dapat mengakui kita sebagai ummatnya, aamiin.

Skripsi ini disusun sebagai tugas dan persyaratan untuk menyelesaikan studi program strata satu (S1) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Selama dalam proses penulisan skripsi ini, penulis banyak sekali menerima bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu perkenankan penulis untuk mengucapkan terimakasih dalam tulisan ini kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M. Ag. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki. M. Si. Selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara, terimakasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk menggarap dan menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A. dan Bapak Arif Fikri, S.H.I., M.Ag. Selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran serta memberikan arahan dan semangat dalam membimbing penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Junedi Sembiring, S. Sos, Ibu Lenny Widyawati, S.E dan Bapak Muhammad kabul, S.Sos., Selaku Pegawai Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandar Lampung yang telah meluangkan

- waktunya untuk wawancara sampai penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Kepada seluruh dosen dan segenap keluarga besar civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
 7. Petugas Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum, dan Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, terimakasih atas izinnya untuk proses peminjaman buku buku demi terealisasikan skripsi ini.
 8. Rekan-rekan seperjuanganku jurusan Hukum Tata Negara angkatan 2016 yang selalu menjadi tempat berbagi selama menempuh pendidikan.
 9. Semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang belum sempat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang sesuai atas segala amal baik serta bantuan yang diberikan kepada penulis. Akhirnya, semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan. Aamiin.

Bandar Lampung, 05 Februari 2021
Penulis,

YUNI MERRYLIANI
NPM. 1621020308

DAFTAR ISI

HALAMANJUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP.....	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus Penelitian.....	6
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Signifikan Penelitian	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
H. Metode Penelitian	10
I. Sistematika Pembahasan.....	14

BAB II KAJIAN TEORI

A. Fiqh Siyasah.....	17
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i>	17
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i>	19
3. Pengertian Siyasah Dusturiyah.....	20
4. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah.....	21
B. Ketenagakerjaan	29
1. Pengertian Tenaga Kerja	29
2. Konsep Hukum Ketenagakerjaan.....	31
3. Para Pihak dalam Hukum Ketenagakerjaan	34
C. Peran Dinas Tenaga Kerja	36

BAB III OBJEK UMUM PENELITIAN

- A. Gambaran Umum Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandar Lampung 41
- B. Upaya yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung dalam Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan 46
- C. Faktor Penghambat Peran Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung dalam Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan 60
- D. Kewenangan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 61

BAB IV ANALISIS DATA

- A. Bagaimana Peran Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandar Lampung dalam mengimplementasi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 67
- B. Analisis *Fiqh Siyasah* terhadap Peran Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandar Lampung dalam mengimplementasi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 69

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 73
- B. Rekomendasi 74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- Lampiran 1 Identitas Responden
- Lampiran 2 Foto Dokumentasi
- Lampiran 3 Kartu Konsultasi

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar prioritas pelayanan publik.....	51
Tabel 3.2 Indikator Ketenagakerjaan Kota Bandar Lampung Tahun 2019.....	53



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Identitas Responden
2. Foto Dokumentasi
3. Lembar Bimbingan
4. Surat Izin Penelitian dari Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung
5. Surat Izin Penelitian dari Kasbangpol Kota Bandar Lampung



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami makna judul skripsi ini, maka perlu kiranya dijelaskan terlebih dahulu makna dari istilah-istilah yang terdapat didalam judul skripsi ini adalah **“Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Peran Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”** (Studi pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandar Lampung). Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.¹
2. *Fiqh Siyāsah* adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.²
3. Peran yaitu aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketentuan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut.³
4. Dinas Tenaga Kerja adalah lembaga pemerintahan yang memiliki fungsi sebagai membina, mengendalikan dan pengawasan dibidang ketenagakerjaan dan memberikan

¹Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 186.

²Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyāsah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), 4.

³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2011), 504.

pelatihan bagi calon pekerja agar memiliki keahlian khusus sesuai dengan permintaan para pencari tenaga kerja dan memberikan kesempatan kerja secara luas, peningkatan pelayanan penempatan tenaga kerja serta untuk memberikan informasi pasar kerja.⁴

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa “Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.”⁵

Berdasarkan penjelasan istilah-istilah tersebut di atas dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul adalah suatu kajian penyelidikan proses atau gagasan dari dinas tenaga kerja dalam melaksanakan perannya dibidang ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dalam perspektif *Fiqh Siyāsah*.

B. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan salah satu perundang-undangan yang banyak disoroti oleh masyarakat. Undang-undang tersebut memuat beberapa ketentuan barumenyangkut kepentingan buruh dan perusahaan. Salah satu topik diantaranya adalah bagaimana Peran Dinas Tenaga Kerja dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.⁶

Dalam menjalankan perannya, Pemerintah daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

⁴Mariam Budiarjo, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Semarang:CV. Widya Karya, 2010), 265.

⁵Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

⁶Muhammad Tholkah Hasan, *Perjanjian Kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan* (Jakarta: DSS Publishing, 2006), 1.

Kurang baiknya kinerja birokrasi menjadi salah satu faktor penting yang mendorong munculnya krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah perbaikan kinerja pelayanan publik diharapkan mampu memperbaiki kembali citra pemerintah di mata masyarakat, karena dengan kualitas pelayanan yang membaik, kepuasan dan kepercayaan masyarakat bisa dibangun kembali sehingga pemerintah bisa meningkatkan legitimasi yang lebih kuat di mata publik. Perubahan lingkungan strategis dalam pemerintahan mempengaruhi cara pendekatan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. kecenderungan sikap aparaturnya yang lebih ingin dilayani dari pada melayani.⁷

Pelayanan Dinas Ketenagakerjaan Daerah seperti memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kerja, hak-hak dasar tenaga kerja perempuan dan program pelatihan pemberdayaan tenaga kerja merupakan salah satu bentuk pelayanan publik, sehingga dapat diketahui keberpihakan Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandar Lampung terhadap tenaga kerja yang ada.

Di samping itu pelayanan di bidang ketenagakerjaan merupakan salah satu retribusi Kota Bandar Lampung. Penyelenggaraan dilakukan pemerintah daerah agar setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk mewujudkan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, maka Pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi hak pekerja/buruh.

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja

⁷Muhammad Azhar, *Hukum Ketenagakerjaan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 12.

serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur dan merata, baik materiil maupun spiritual.⁸

Manusia dibekali oleh Tuhan dengan beberapa potensi dasar, yang sangat membantu manusia dalam melakukan kegiatan-kegiatan hidupnya. Potensi-potensi dasar itu berupa potensi ragawi atau fisik, potensi nalar atau akal dan potensi hati nurani dan qalbu. Pengembangan dan aktualisasi fungsi ketiga potensi tersebut kerap kali tidak berjalan dan berkembang dengan baik, sehingga mengurangi kemampuan manusia dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan.⁹

Kehidupan manusia akan berlangsung dengan baik dan bahagia bila terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Untuk itu ia harus bekerja dan Allah SWT telah menyediakan segala sesuatunya di muka bumi berupa kekayaan alam yang dapat diolah dan dikelola sehingga dapat dinikmati oleh manusia.¹⁰ Allah SWT berfirman:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ
عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾ (سورة التوبة:

(١٠٥)

“Dan katakanlah, "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kalian akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberikan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”(Qs. At-taubah [9]:105)¹¹

⁸Putra Astomo, *Hukum Tata Negara Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2014), 62.

⁹Muhammad Tholkah Hasan, *Islam dan Sumberdaya Manusia*, (Jakarta: Lantoboraees, 2005), 106.

¹⁰ Yusuf al-Qardhawi, *Fikih Daulah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah Alih Bahasa kathun Suhadi*, (Yogyakarta: Assafa, 2000), 46.

¹¹Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya* (Bandung: CV Jumanatul Ali-Art (J-ART), 2004), 201.

Setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. *Good Governance* (tata pemerintahan yang baik) telah lama menjadi mimpi banyak orang Indonesia. kendati pemahaman mengenai Good Governance berbeda-beda, sebagian dari mereka membayangkan bahwa dengan good governance mereka akan dapat memiliki kualitas pemerintahan yang lebih baik.

Banyak diantara mereka membayangkan bahwa dengan memiliki praktik governance yang lebih baik maka kualitas public pelayanan public menjadi semakin baik, angka korupsi menjadi semakin rendah dan pemerintah menjadi semakin peduli kepentingan warga.¹²

Dalam UUD NKRI 1945 Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk republik. Ini berarti bahwa Negara yang berbentuk Negara kesatuan, maka segenap kekuasaan atau kewenangan serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan dan kelangsungan hidup bangsa Indonesia berada dibawah kendali satu pemegang kekuasaan terpusat yang terdapat pada pemerintah pusat.

Dengan demikian corak sistem pemerintahan tersebut adalah bersifat sentralisasi.¹³ Namun karena wilayah Negara republik Indonesia sedemikian luasnya dan didiami berbagai suku bangsa yang beraneka ragam, maka corak pemerintahan sentralis bukanlah tipe ideal sistem pemerintahan yang cocok untuk mengatur wilayah dan penduduk yang demikian banyak dan beragam itu, untuk itu diaturlah corak pemerintahan di Indonesia berdasarkan sistem pembagian kekuasaan anatar pemerintah

¹²Ni'matul Huda, *Ilmu Hukum*, edisi I, Cetakanke 3, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 218.

¹³Hadjon, Philipus, *Pengantar Hukum Administrasi*, (Yogyakarta: Gajah Mada Press University, 1999), 77.

pusat dan pemerintah daerah berdasarkan corak desentralisasi sebagaimana tercermin dalam pasal 18 UUD 1945.¹⁴

Bidang ketenagakerjaan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah yang bersifat wajib harus dikelola dengan baik di daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi secara nasional melalui daerah. Pengelolaan bidang ketenagakerjaan di Kota Bandar Lampung seperti memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kerja dan peningkatan kualitas produktivitas tenaga kerja merupakan roda pembangunan ekonomi daerah. Pelayanan Pemerintah Kota Bandar Lampung di bidang ketenagakerjaan merupakan salah satu retribusi Kota Bandar Lampung yang berarti sumber pendapatan daerah untuk itu perlu dilakukan penelitian yang berjudul “Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Peran Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”.

Dengan penelitian ini maka dapat diketahui bagaimana kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat Kota Bandar Lampung dalam bidang ketenagakerjaan, serta kendala-kendala yang dihadapi pemerintah Kota Bandar Lampung dalam pelaksanaan kewenangan tersebut sehingga dapat diwujudkan pemerintahan yang baik.

C. Fokus Penelitian/Batasan Masalah

1. Fokus penelitian adalah Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Peran Dinas Tenaga Kerja dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
2. Kajian penelitian ini dibatasi hanya dalam lingkup Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandar Lampung.

¹⁴Ni'matul Huda, *Ilmu Hukum*, 21.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan?
2. Bagaimana analisis *fiqh siyāsah* terhadap Peran Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Peran Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
2. Untuk mengetahui analisis *fiqh siyāsah* terhadap Peran Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

F. Signifikansi/Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis yaitu:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan bidang keilmuan yaitu Hukum Tata Negara, khususnya dalam mengkaji pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah di kota Bandar Lampung.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi rekan-rekan mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Raden Intan Lampung mengenai pelaksanaan kewenangan

pemerintah daerah di kota Bandar Lampung. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan kajian bagi Pemerintah Daerah untuk dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan Undang-undang.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan peninjauan dari beberapa penelitian yang sudah di lakukan sebelumnya ada beberapa penelitian yang berkaitan tentang ketenagakerjaan.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ratminto, mahasiswa fakultas syariah dan hukum UIN Sunan Kalijaga tahun 2011 yang berjudul “*Outsourcing dan Implementasinya di Indonesia (Studi Kompratif antara Undang-undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam)*”. Skripsi ini secara umum menjelaskan tentang perjanjian kerja dalam *outsourcing* menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang sudah sesuai dengan aturan yang terdapat dalam islam, sedangkan skripsi yang disusun lebih menekankan pada penerapan Undang-undang ketenagakerjaan tersebut dalam bidang *outsourcing*.¹⁵
2. Penelitian yang dilakukan oleh Khusnan Iskandar, fakultas syariah dan hukum UIN Sunan Kalijaga yang berjudul *Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Studi Kasus Perbandingan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)* menerangkan bahwa dalam hukum islam tidak ada larangan memberikan batasan dalam klausul perjanjian, kemudian mengenai kontroversi yang terjadi dengan adanya perjanjian kerja waktu tertentu.

Yang diatur dalam undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebabkan karena adanya perjanjian, kemudian mengenai diatur dalam Undang-undang

¹⁵Ratminto “*Outsourcing dan Implementasinya di Indonesia (Studi Kompratif antara Undang-undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam)*” Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2011

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebabkan karena adanya penyalahgunaan yang dilakukan oleh pihak perusahaan, dimana perusahaan memakai pasal perjanjian tertentu untuk perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

Berbeda dengan skripsi yang akan dibahas, skripsi diatas mengkaji tentang perjanjian kerja waktu tertentu terkait perbandingan antara hukum islam dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sedangkan skripsi ini yang akan dibahas mengkaji tentang penerapan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan terhadap sistem outsourcing.¹⁶

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rini Angraeni, yang berjudul “Hubungan Kualitas Pelayanan Pembuatan Kartu Kuning Dengan Kepuasan Pencari Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja” fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2018. Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

Ditinjau dari bukti langsung menunjukkan persepsi responden bahwa ruang pelayanan cukup bersih dan tertata rapih, namun demikian dilihat dari luas ruangan pelayanan masih belum memadai. Ditinjau dari daya tanggap menunjukkan bahwa petugas kurang siap membantu pencari kerja, apabila mendapat masalah dalam proses pelayanan pembuatan kartu kuning. Ditinjau dari jaminan menunjukkan bahwa petugas kurang memberikan kesan yang baik kepada pencari kerja dalam proses pelayanan pembuatan kartu kuning.¹⁷

¹⁶Khusnan Iskandar “*Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Studi Kasus Perbandingan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)*” Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2011.

¹⁷Rini Angraeni “*Hubungan Kualitas Pelayanan Pembuatan Kartu Kuning Dengan Kepuasan Pencari Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja*” fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2018.

H. Metode Penelitian

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah yang sistematis.¹⁸ Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deduktif dan induktif alasannya karena metode kualitatif dengan pendekatan deduktif dan induktif lebih relevan dalam mengelola datanya sedangkan untuk mewujudkan gambar penelitian yang baik, maka dibutuhkan serangkaian langkah-langkah yang sistematis. Adapun langkah-langkah tersebut adalah:

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial tentunya bersifat apa adanya, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.¹⁹ Adapun data-data lapangan adalah data-data yang berkaitan dengan sejarah, struktur keorganisasian, ideologi dan tujuan dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandar Lampung.

b. Sifat penelitian

Kemudian sifat penelitian ini yaitu bersifat deskriptif analitis. Yang dimaksud dengan metode deskriptif adalah “Suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan di antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu”.²⁰ Dalam penelitian ini akan digambarkan bagaimana Peran Dinas Tenaga Kerja dalam

¹⁸Husaini Usman Dan Purnomo Stiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 41.

¹⁹Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 24.

²⁰Kaelan, M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Jakarta: Pradigma, 2005), 58.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (dalam kajian *Fiqh Siyāsah*).

2. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di terapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya.²¹Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai Dinas Ketenagakerjan Kota Bandar Lampung.

3. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang di ambil dengan cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap dan dapat mewakili populasi.²²Sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* penentuan sampel dalam teknik ini dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel.²³*Purposive sampling* adalah peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karna ada pertimbangan tertentu, jika sampel tidak diambil secara acak tetapi ditentukan sendiri oleh peneliti, karena peneliti hanya akan mengambil sampel dengan beberapa pihak yang kaitannya dengan masalah yang diteliti Yang menjadi sampel adalah Pegawai Dinas Ketenagakerjan Kota Bandar Lampung yaitu seperti Kabid Dinas Ketenagakerjaan, Masyarakat yang melakukan pelayanan di Dinas Ketenagakerjaan, Staf Kasubag bagian umum yang memberikan data terhadap penelitian ini.

4. Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya

²¹Sugiono, *Metode Penelitian pendidikan: pendekatan kualitatif dan kuantitatif dan R&R*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 117.

²²*Ibid*,125.

²³Suharsimi Arikunto, *Prossuder Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Bina Aksara,191), 102.

dengan objek yang diteliti, data tersebut bisa diperoleh langsung dari personel yang diteliti dan dapat pula berasal dari lapangan.²⁴ Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil dokumentasi dan interview dengan Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan perannya terhadap Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di Bandar Lampung (dalam kajian *Fiqh Siyāsah*).

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang dianggap menunjang dalam penelitian ini, yang terdiri dari:²⁵

- 1) Bahan hukum, yaitu bahan-bahan yang mengikat dan terdiri dari kaidah dasar, seperti peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya, antara lain:
- 2) Undang-Undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang Ketenagakerjaan.
- 4) Buku-buku literatur ilmu hukum, karya ilmiah dari kalangan hukum, jurnal hukum, dan artikel, serta bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
- 5) Bahan-bahan lain yang berguna untuk memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti hasil penelitian, bulletin, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

²⁴Moh Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 57.

²⁵*Ibid*, 58.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara(*Interview*)

Wawancara merupakan percakapan yang memiliki maksud tertentu. Percakapan biasanya dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban dari pertanyaan itu.²⁶ Adapun dalam penelitian ini menggunakan jenis wawancara tidak terstruktur, dimana pertanyaan-pertanyaan yang di ajukan tidak mengikuti panduan.

b. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Dengan ini penelitian dapat dengan mudah memperoleh data yaitu dengan cara datang langsung ke tempat penelitian dan *interview* kepada pihak terkait.²⁷

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel yang merupakan catatan, transkrip, buku-buku, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.²⁸ Metode dokumentasi penulis melakukan data tentang aktivitas terhadap pelaksanaan peran dinas tenaga kerja dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

²⁶Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 186.

²⁷*Ibid*, 185.

²⁸Ronny Kountur, *Metode Penelitian untuk penulisan Skripsi dan Tesis* (Jakarta: PPM 2014), 41-43.

6. Metode Pengolahan Data

Setelah keseluruhan data terkumpul maka tahap selanjutnya adalah pengolahan data. Pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara sebagai berikut :²⁹

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai dengan masalah;
- b. Rekonstruksi data (*rekontrucing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterorestasikan;
- c. Sistematisasi data (*sistemizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

7. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu peran dinas tenaga kerja dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Perspektif *Fiqh Siyāsah* (Studi pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandar Lampung). Kemudian dikaji dengan menggunakan analisis secara kualitatif yang berupa suatu prosedur yang menghasilkan data deskriptif, yang merupakan gambaran penjelasan secara logis dan sistematis. Metode berfikir yang digunakan secara deduktif, dari suatu jawaban dan permasalahan pokok yang diangkat didalam penelitian.

I. Sistematika Pembahasan

BAB I

Bab ini berisi tentang Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus dan sub-sub Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian

²⁹ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010), 144.

Terdahulu Yang Relevan, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB II

Pada bab ini memuat tentang uraian kerangka teori yang relevan dan terkait dengan tema skripsi.

BAB III

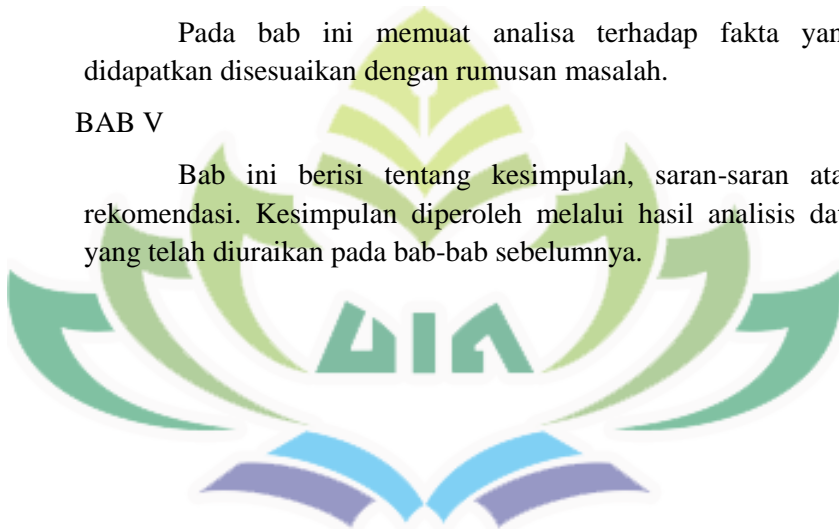
Bagian bab III akan menjawab rumusan masalah mengenai peran dinas tenaga kerja dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

BAB IV

Pada bab ini memuat analisa terhadap fakta yang didapatkan disesuaikan dengan rumusan masalah.

BAB V

Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan diperoleh melalui hasil analisis data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Peran Dinas Tenaga Kerja di bidang ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, secara umum berjalan baik namun perlu ditingkatkan kembali kinerja pemerintah daerah, untuk itu secara khusus dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Dinas Tenaga Kerja dalam mengimplementasi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandar Lampung, diantaranya Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja, Penempatan Tenaga Kerja, Informasi Kesempatan Kerja, Hubungan Industrial dan Pelayanan Kartu Kuning. Terdapat strategi yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dalam pelayanan bidang ketenagakerjaan di Kota Bandar Lampung, yaitu dengan melibatkan masyarakat, dimana dengan mengajak masyarakat berpartisipasi dan untuk mengikuti kegiatan pelatihan dan keterbukaan informasi dan bertanggungjawab, dimana informasi yang diberikan kepada masyarakat dapat diperoleh melalui papan pengumuman juga website yang ada. Kendala yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung dalam pelayanan Ketenagakerjaan terbagi 2 (dua) yaitu segala bentuk penghambat dan tidak tepat sasaran yang disebabkan oleh Pemkot atau pusat. Kemudian segala bentuk permasalahan yang disebabkan oleh faktor para pencari kerja maupun kondisi diluar Pemerintah Kota.
2. Dalam pandangan *Fiqh Siyāsah* upaya yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja sudah sesuai dengan syariat Islam dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat sekaligus menjadikan lebih tertib sehingga tidak menimbulkan kemudharatan dari

perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Manusia sebagai *khalifah* di bumi ialah untuk dapat memakmurkan bumi sesuai dengan syariat Islam. *Khalifah* dalam pandangan Islam selain bertanggung jawab pada dirinya sendiri dia juga harus memikul tanggung jawab sesama makhluk hidup lain nya dan seluruh alam.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan skripsi diatas, maka diperlukan perhatian yang lebih serius lagi atau peningkatan kinerja adalah:

- 1) Pemerintah Daerah dalam hal pemenuhan hak pekerja/buruh atas atas pelayanan dibidang ketenagakerjaan diletakkan dalam konteks yang lebih luas. Jika yang menjadi masalah adalah bagaimana peran dalam pelayanan dibidang ketenagakerjaan (bukan hanya tugas Pengawas dan Mediator Hubungan Industrial), maka fokus utama mestinya diarahkan bagaimana komitmen pemerintah daerah dalam koordinasi teknis lintas sektor dilingkungan SKPD terkait, sehingga bidang ketenagakerjaan juga dianggap penting.
- 2) Pegawai pengawas ketenagakerjaan harus lebih memaksimalkan fungsinya dalam hal pembinaan dan penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran norma dibidang ketenagakerjaan, Perlunya koordinasi yang jelas serta sosialisasi informasi yang merata bagi para pencari kerja, kemudian masyarakat khususnya para pencari kerja sekiranya melaporkan diri untuk didata di Dinas Tenaga kerja Kota Bandar Lampung agar distribusi pekerjaan mampu diakses lebih cepat dan merata.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Asikin, Zainal. *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Astomo, Piutra. *Hukum Tata Negara Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Thafa Media, 2014.

Azhar, Muhammad. *Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: RinekaCipta, 2011.

Al-Qardhawi, Yusuf. *Fikih Daulah dalam Perspektif Al-Qur''an dan Sunnah Alih Bahasa kathun Suhadi*, Yogyakarta: Assafa, 2000.

Al-Qardhawi, Hadyu Al Islam, terj. Tarmana Ahmad Qasim, dkk, *Problematika Islam Masa Kini Qardhawi Menjawab* (Bandung: TrigendaKarya, 1996.

Atik Septi Winarsih, Ratmibto. 2005. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 2011

Arikunto, Suharsimi. *Prosuder Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Bina Aksara, 1991

Administrasi Negara, Lembaga. *Penyusunan Standar Pelayanan Publik*. Jakarta: Gramedia, 2003

Djazali, *Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2003.

Djalil, Basiq. *Peradilan Islam*, Jakarta: Amzah, 2012

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2011).

Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya*, Bandung: CV Jumanatul Ali-Art (J-ART), 2004

Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemashlahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta: Predana Media, 2003.

Departemen Agama RI, *al-Quran al-Karim dan Terjemahannya Departemen Agama RI*

Hadjon, Philipus, "*Pengantar Hukum Administrasi*", Yogyakarta : Gajah Mada Press University, 1999.

Huda, Ni'matul. *Ilmu Hukum* ,edisi I, Cetakanke 3, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011

Ibrahim, *Penggunaan Wewenang Menurut Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka, 2011

Imam Amrusi Jalani, *Hukun Tata Negara Islam*, Surabaya: IAIN Press, 2011.

Kaelan, M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Jakarta: Pradigma, 2005.

Kurniawan. Agung. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pusaka, 2005.

Kountur, Ronny. *Metode Penelitian untuk penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta: PPM 2014.

Manan, Bagir. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*(Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,1994.

Muhammad, Iqbal. *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* jakarta: Kencana,2014.

Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung: Remaja Rosda karya, 2017.

Mujar Ibn Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008.

Narbuko, Chlid. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Purnomo Stiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Poerwadarminta W.J.S, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

Pulungan, Suyuti. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.

Rahayu, Devi. *Hukum Ketenagakerjaan Teori dan Studi Kasus*, Yogyakarta: New Elmatara, 2011.

Romadhoni, Wira. *Ketenagakerjaan*, Surabaya: Gramedia, 2012.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Sugiono, *Metode Penelitian pendidikan: pendekatan kualitatif dan kuantitatif dan R&R*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Sendjun Manulang, *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001.

Supriadi, Deddy B., Dadang S., “*Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*”, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007.

Tholkah Muhammad Hasan, *Perjanjian Kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan* Jakarta: DSS Publishing, 2006.

Tholkah Hasan, Muhammad. *Islam dan Sumber daya Manusia*, Jakarta: Lantoboraees, 2005.

Uwiyono, Aloysius. *Asas-asas Hukum Perburuhan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

C. Jurnal

Ratminto "*Outsourcing dan Implementasinya di Indonesia (Studi Kompratif antara Undang-undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam*" Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2011.

Khusnan Iskandar "*Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Studi Kasus Perbandingan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)*" Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2011.

Sutarman (2007), *Kerjasana Antar Daerah Dalam Pelayanan Perizinan Dan Penegakan Hukum Penangkapan Ikan Di Wilayah Laut*, Disertasi Airlangga.

D. Wawancara

Wawancara dengan Junedi Sembiring selaku sub bagian umum Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung pada tanggal 17 Februari 2021

Wawancara dengan Lenny Widyawati selaku sekretaris Dinas
Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung pada tanggal 17
Februari 2021

Wawancara dengan Muhammad Kabuselaku Kabid Penempatan
dan perluasan kesempatan kerja Dinas Tenaga Kerja Kota
Bandar Lampung pada tanggal 17 Februari 2021

